

## **PENELITIAN ASLI**

# **ANALISIS EFISIENSI ANGGARAN PASCA PENGGABUNGAN SATUAN KERJA PEMERINTAH: INVESTIGASI PADA UPT BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN WILAYAH X**

**Umi Wulandari<sup>1</sup>, Ratri Paramitalaksmi<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>*Fakultas Ekonomi, Universitas Mercu Buana  
Yogyakarta, Sleman, D.I. Yogyakarta, 55283, Indonesia*

---

### **Info Artikel**

Riwayat Artikel:  
Diterima: 16 Nov 2024  
Direvisi: 1 Des 2024  
Diterima: 17 Des 2024  
Diterbitkan: 23 Des 2024

**Kata kunci: Efisiensi; Satuan Kerja Pemerintah**

**Penulis Korespondensi:**  
Umi Wulandari  
Email: [umiwulandari937@gmail.com](mailto:umiwulandari937@gmail.com)

---

### **Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur efektifitas penggunaan dana pada salah satu instansi pemerintah yang melaksanakan pengelolaan keuangan pasca penggabungan, yaitu UPT Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X. Objek Penelitian adalah data sekunder yang tersedia berupa data internal yang diperoleh secara langsung dengan dokumentasi dari UPT Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X. Data yang diperoleh dari pengumpulan tersebut kemudian diolah dengan menghitung capaian kinerja, efisiensi, dan nilai efisiensi dengan menggunakan rumus dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran UPT Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X selama tahun 2023 dilakukan secara sangat efisien dibandingkan dengan UPT yang sebelum dilakukan penggabungan satuan kerja. Pelaksanaan anggaran tahun 2022 pada masing-masing UPT sebelum dilakukan penggabungan pada UPT Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta dan UPT Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah dalam kategori cukup efisien, sedangkan pada UPT Balai Pelestarian Nilai Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kategori efisien. Pelaksanaan anggaran tahun 2023 masa awal penggabungan menjadi Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X dalam kategori sangat efisien. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai efisiensi pengelolaan anggaran tersebut adalah realisasi capaian keluaran kegiatan dan realisasi anggaran. Realisasi capaian keluaran yang tinggi dan realisasi anggaran yang rendah akan menunjukkan pengelolaan anggaran yang efisien. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPT Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X perlu meningkatkan efisiensi pada tahun-tahun mendatang dengan jumlah kegiatan jumlah kegiatan yang dilakukan dibandingkan dengan jumlah kegiatan yang direncanakan, serta memanfaatkan anggaran secara efisien.

---



## 1. Pendahuluan

Pelestarian kebudayaan memiliki peran integral dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya suatu daerah. UPT Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X, sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pelestarian kebudayaan di wilayah tersebut, memegang peranan penting dalam menjalankan program dan kegiatan yang mendukung tujuan ini. Dalam beberapa tahun terakhir, terobosan struktural melalui penggabungan satuan kerja pemerintah telah menjadi fokus untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik (Winasta, Kade Yuja Krisna & Maradona, 2023).

Penggabungan satuan kerja pemerintah, termasuk pada UPT Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X, merupakan inisiatif yang diharapkan dapat memperkuat koordinasi, mengurangi duplikasi, dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya (Kemendikbudristek, 2022). Salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian adalah dampak perubahan struktural ini terhadap efisiensi pengelolaan anggaran UPT Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X.

Efisiensi anggaran menjadi parameter kunci untuk mengevaluasi keberhasilan penggabungan satuan kerja pemerintah dalam konteks pengelolaan anggaran (Winasta, Kade Yuja Krisna & Maradona, 2023). Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis bagaimana perubahan struktural, khususnya penggabungan satuan kerja pemerintah, dapat memengaruhi alokasi anggaran, penggunaan dana, dan akhirnya, efektivitas pelaksanaan program pelestarian kebudayaan.

Latar belakang penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan pengetahuan mengenai dampak penggabungan satuan kerja pemerintah pada efisiensi anggaran di UPT Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika ini, dapat diperoleh informasi yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan dalam merencanakan, mengelola, dan mengevaluasi perubahan struktural, serta memberikan panduan bagi lembaga serupa di seluruh wilayah.

Analisis efisiensi anggaran pada UPT Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang sejauh mana penggabungan satuan kerja pemerintah dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengelolaan anggaran, khususnya dalam konteks pelestarian kebudayaan (Winasta, Kade Yuja Krisna & Maradona, 2023). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan baru dan memberikan kontribusi berarti untuk perbaikan kebijakan dan praktik manajemen keuangan pada lembaga serupa di seluruh negeri.

Tabel 1. Serapan Realisasi Anggaran Tahun 2022 dan 2023

Tahun	Instansi	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
2022	BPNB DIY	10.000.059.000	8.826.857.780	88,27
2022	BPCB DIY	29.392.967.000	28.025.758.950	95,35
2022	BPCB Jateng	30.795.170.000	29.932.963.820	97,20
2023	BPK X	131.862.647.000	129.514.965.549	98,22

Sumber: Laporan Keuangan

Tabel 1 menunjukkan informasi tentang persentase realisasi anggaran UPT Balai Pelestarian Nilai Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2022 sebesar 88,27%, persentase realisasi anggaran UPT Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2022 sebesar 95,35%, dan persentase realisasi anggaran UPT Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah sebesar 97,20%. Dengan pasca penggabungan persentase realisasi anggaran UPT Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X sebesar 98,22%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam UPT sebelumnya realisasi anggaran terjadi perubahan setelah penggabungan satuan kerja. Karena kegiatan yang direncanakan belum sepenuhnya terlaksana, atau semua kegiatan sudah terlaksana secara efisien. Pada tahun 2023 kinerja anggaran UPT Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X sudah diukur berdasarkan capaian indikator kinerja. Namun belum dilakukan pengukuran kinerja anggaran terkait efisiensi penggunaan anggaran, oleh karena itu diperlukan penelitian dengan judul Analisis Efisiensi Anggaran Pasca Penggabungan Satuan Kerja Pemerintah: Studi Kasus Pada UPT Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X.

Rumusan masalah penelitian ini adalah apakah pelaksanaan pengelolaan anggaran tahun 2023 UPT Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X pasca penggabungan telah dilakukan secara efisien? Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efisiensi penggunaan anggaran tahun 2023 UPT Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X.

### **Penggabungan Satuan Kerja Pemerintah (UPT BPK Wilayah X)**

Berdasarkan Permendikbudristek No. 33 Tahun 2022 bahwa terhitung mulai 1 November 2022, UPT Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah (BPCB Jateng), Balai Pelestarian Nilai Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta (BPNB DIY), dan Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta (BPCB DIY) bergabung menjadi UPT Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X (BPK X). Merupakan lembaga pemerintah yang memiliki peran strategis dalam melestarikan dan mengembangkan kekayaan budaya di suatu wilayah tertentu. UPT BPK X ini memiliki tanggung jawab utama untuk merawat, memelihara, dan mempromosikan warisan budaya yang ada di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Kemendikbudristek, 2022).

Tugas pokok UPT BPK X adalah melaksanakan pelestarian Cagar Budaya (CB) dan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang mencakup berbagai kegiatan, seperti penelitian, dokumentasi, pemugaran, dan penyelenggaraan kegiatan budaya. Melalui upaya ini, UPT BPK X berperan dalam menjaga identitas budaya, melestarikan tradisi, serta menyediakan sarana edukasi kepada masyarakat terkait kekayaan budaya yang dimiliki. Sebagai lembaga pelestarian budaya, UPT BPK X juga dapat berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait, baik dari sektor publik maupun swasta, guna meningkatkan efektivitas pelestarian dan pemanfaatan kekayaan budaya. Kolaborasi ini dapat

melibatkan berbagai pihak, seperti komunitas lokal, ahli waris budaya, dan lembaga Pendidikan (Kemendikbudristek, 2022).

Penggabungan satuan kerja pemerintah merupakan suatu strategi dalam perombakan struktural birokrasi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Proses ini melibatkan pengintegrasian dua atau lebih unit atau instansi pemerintah yang memiliki tanggung jawab atau fungsi serupa. Tujuan utamanya adalah mencapai sinergi operasional, menghilangkan tumpang tindih fungsi, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya. Langkah ini biasanya diambil dalam rangka merespons dinamika perubahan sosial, ekonomi, dan politik, serta untuk meningkatkan kinerja pemerintahan secara keseluruhan.

Dampak dari penggabungan satuan kerja pemerintah dapat sangat signifikan, termasuk efisiensi birokrasi, penghematan anggaran, dan peningkatan kapasitas layanan. Namun, pelaksanaannya memerlukan perencanaan yang matang, koordinasi yang baik, serta pemahaman mendalam terhadap dinamika internal dan eksternal organisasi yang bersangkutan.

### **Efisiensi**

Efisiensi anggaran merujuk pada kemampuan suatu organisasi atau entitas pemerintahan dalam menggunakan sumber daya finansial secara optimal untuk mencapai tujuan dan hasil yang diinginkan. Dalam konteks pemerintahan, efisiensi anggaran menjadi elemen krusial dalam manajemen keuangan yang bertujuan untuk menghindari pemborosan, memaksimalkan output, dan meningkatkan pelayanan publik (Olfah, 2018).

Efisiensi anggaran tidak hanya terbatas pada aspek pengelolaan dana, tetapi juga melibatkan evaluasi menyeluruh terhadap proses perencanaan, alokasi, dan penggunaan anggaran. Ini mencakup penilaian terhadap tingkat keterlibatan masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan siklus anggaran (Suliantoro, 2020). Pentingnya efisiensi anggaran semakin terlihat mengingat keterbatasan sumber daya keuangan dalam konteks pelayanan publik. Organisasi pemerintah perlu memiliki mekanisme pengawasan dan kontrol yang efektif untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan memiliki dampak maksimal terhadap pencapaian tujuan strategis (Kementerian Keuangan, 2023).

Dampak penggabungan terhadap efisiensi anggaran merujuk pada perubahan signifikan dalam pengelolaan dana organisasi pemerintah setelah melalui proses pengintegrasian satuan kerja. Penggabungan ini dapat membawa konsekuensi positif, seperti peningkatan penggunaan sumber daya secara efektif, atau sebaliknya, menimbulkan tantangan baru yang dapat mempengaruhi keefektifan alokasi anggaran (Suliantoro, 2020).

Salah satu dampak positif yang diharapkan dari penggabungan adalah potensi penghematan anggaran. Melalui integrasi fungsi dan peningkatan koordinasi, organisasi dapat mengurangi tumpang tindih dan redundansi dalam kegiatan operasionalnya. Hal ini diharapkan dapat membawa efisiensi dalam penggunaan anggaran, dengan meningkatkan efektivitas pelayanan dan mencapai target kinerja (Kementerian PANRB, 2023).

Efisien maksudnya penggunaan dana masyarakat menghasilkan output yang maksimal. Efektif berarti penggunaan anggaran harus mencapai target atau tujuan untuk kepentingan publik (Nugraeni, Paramitalaksmi, & Wafa, 2022).

Namun, dampak penggabungan terhadap efisiensi anggaran juga dapat mencakup tantangan. Proses integrasi yang tidak terkelola dengan baik dapat menimbulkan

ketidakpastian, resistensi internal, dan penurunan produktivitas. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis menyeluruh terhadap perubahan struktural, sistem manajemen keuangan, dan proses perencanaan anggaran untuk memahami dampaknya secara komprehensif (Winasta, Kade Yuja Krisna & Maradona, 2023).

## 2. Metode

### Pengukuran Efisiensi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 berisi mengenai Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara Lembaga pada Pasal 8 ayat (2) dinyatakan bahwa Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi dilakukan dengan mengukur variabel capaian keluaran, penyerapan anggaran, efisiensi, dan konsistensi perencanaan. Informasi yang diperlukan untuk mengukur kinerja operasional meliputi: capaian keluaran kegiatan, pagu anggaran, dan realisasi anggaran. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan hasil perhitungan penjumlahan ( $\Sigma$ ) dari selisih antara perkalian alokasi anggaran keluaran dan capaian keluaran dengan realisasi anggaran keluaran, dengan hasil perhitungan penjumlahan ( $\Sigma$ ) alokasi anggaran keluaran dengan menggunakan rumus:

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$$

Keterangan :  $E_{RO}$  adalah efisiensi RO tingkat satuan kerja,  $AARO_i$  adalah alokasi anggaran keluaran,  $RARO_i$  adalah realisasi anggaran keluaran,  $CRO_i$  adalah capaian keluaran. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran.

### Jenis dan Sumber Data

Data penelitian berupa hasil pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dengan cara menggunakan data yang telah ada, seperti Rencana Kerja Anggaran, Laporan Kinerja, dan Laporan Realisasi Anggaran terhadap Tingkat Efisiensi pada Kantor UPT Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X di Yogyakarta.

### Metode Analisis Data

Penggunaan analisis data untuk mengolah data, memudahkan pemahaman, dan interpretasi data. Data yang akan dianalisis merupakan bahan penelitian yang berasal dari penelitian luar ruang dan kepustakaan. Kemudian melakukan analisa untuk menarik kesimpulan. Adapun tahapan analisis data sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 sebagai berikut:

1. Pengukuran capaian keluaran (*output*) kegiatan dengan menggunakan rumus:

$$CRO = \left( \prod_{i=1}^m \frac{RVRO_i}{TVRO_i} \right)^{\frac{1}{m}} \times 100\%$$

Keterangan : CRO adalah capaian keluaran kegiatan,  $RVRO_i$  adalah realisasi volume

keluaran kegiatan, TVRO<sub>i</sub> adalah target volume keluaran kegiatan, m adalah jumlah keluaran kegiatan.

2. Pengukuran efisiensi realisasi anggaran sebagai berikut:

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$$

Keterangan : E<sub>RO</sub> adalah efisiensi RO tingkat satuan kerja, AARO<sub>i</sub> adalah alokasi anggaran keluaran, RARO<sub>i</sub> adalah realisasi anggaran keluaran, CRO<sub>i</sub> adalah capaian keluaran

3. Melakukan transformasi skala efisiensi  
Untuk tujuan agar memperoleh skala nilai yang terukur antara 0% sampai dengan 100%, dengan rumus sebagai berikut:

$$NE = 50\% + \left( \frac{E}{20} \times 50 \right)$$

Keterangan : NE adalah nilai efisiensi dan E adalah efisiensi.

4. Mendefinisikan kategori nilai efisiensi dengan kriteria  
Apabila nilai efisiensi menunjukkan lebih dari 90% maka penggunaan anggaran dikatakan sangat efisien. Apabila nilai efisiensi menunjukkan lebih dari 80% sampai 90% maka penggunaan anggaran dikatakan efisien. Apabila nilai efisiensi menunjukkan lebih dari 60% sampai 80% maka pelaksanaan anggaran dikatakan cukup efisien. Apabila nilai efisiensi menunjukkan lebih dari 50% sampai 60% maka pelaksanaan anggaran dikatakan kurang efisien. Apabila nilai efisiensi menunjukkan dibawah 50% maka pelaksanaan anggaran dikatakan sangat kurang efisien

### 3. Hasil

Dengan perhitungan Efisiensi Anggaran UPT Balai Pelestarian Nilai Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 sehingga ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Efisiensi Anggaran BPNB DIY tahun 2022

Kode Keluaran	Nama Keluaran	Realisasi Anggaran (%)	Capaian Keluaran (%)	Efisiensi (%)	Nilai Efisiensi (%)	Kategori
QMA003	Karya Budaya Yang Dilestarikan	92,72	105,26	12,54	81,35	Efisien
EBA994	Layanan Perkantoran	83,3	100	16,7	91,74	Sangat Efisien
QDC006	Fasilitasi dan Kemitraan Nilai Budaya	99,83	100	0,17	50,43	Kurang Efisien
EBA962	Layanan	79,61	100	20,4	100,98	Sangat

PEG005	Umum Even Nilai Budaya Yang Dikembangkan dan Dimanfaatkan	92,85	114,29	21,43	103,58	Efisien Sangat Efisien
ABH001	Kajian Nilai Budaya	98,33	100	1,67	54,17	Kurang Efisien
TOTAL		88,27	104,85	15,82	89,56	Efisien

Sumber: Data diolah 2024

Sesuai Tabel 2 informasi yang diperoleh adalah persentase nilai efisiensi realisasi anggaran UPT BPNB DIY tahun 2022 secara keseluruhan efisien dengan nilai 89,56%. Nilai efisiensi realisasi anggaran Sangat Efisien terjadi pada keluaran Layanan Perkantoran (EBA994), Layanan Umum (EBA962), dan Even Nilai Budaya Yang Dikembangkan dan Dimanfaatkan (PEG005). Nilai efisiensi realisasi anggaran Cukup Efisien terjadi pada keluaran Karya Budaya Yang Dilestarikan (QMA003). Nilai efisiensi realisasi anggaran Kurang Efisien terjadi pada keluaran Fasilitas dan Kemitraan Nilai Budaya (QDC006) dan Kajian Nilai Budaya (ABH001).

Tabel 3. Perhitungan Efisiensi Anggaran BPCB DIY tahun 2022

Kode Keluaran	Nama Keluaran	Realisasi Anggaran (%)	Capaian Keluaran (%)	Efisiensi (%)	Nilai Efisiensi (%)	Kategori
RDN015	Cagar Budaya Yang Dilestarikan	89,11	119,4	30,3	125,74	Sangat Efisien
QAA003	Masyarakat Yang Mengapresiasi Cagar Budaya	98,31	118,28	19,97	99,92	Sangat Efisien
EBA962	Layanan Umum	98,29	100	1,71	54,29	Kurang Efisien
EBA994	Layanan Perkantoran	96,26	100	3,74	59,36	Kurang Efisien
TOTAL		95,35	118,28	9,28	73,21	Cukup Efisien

Sumber: Data diolah 2024

Sesuai Tabel 3 informasi yang diperoleh adalah persentase nilai efisiensi realisasi anggaran UPT BPCB DIY tahun 2022 secara keseluruhan Cukup Efisien dengan nilai 73,21%. Nilai efisiensi realisasi anggaran Sangat Efisien terjadi pada keluaran Cagar Budaya Yang Dilestarikan (RDN015) dan Masyarakat yang Mengapresiasi Cagar Budaya (QAA003). Nilai efisiensi realisasi anggaran Kurang Efisien terjadi pada keluaran Layanan Umum (EBA962) dan Layanan Perkantoran (EBA994).

Tabel 4. Perhitungan Efisiensi Anggaran BPCB Jateng tahun 2022

Kode Keluaran	Nama Keluaran	Realisasi Anggaran (%)	Capaian Keluaran (%)	Efisiensi (%)	Nilai Efisiensi (%)	Kategori
ABH006	Naskah	90,11	105,26	9,89	74,73	Cukup

	Pelestarian Cagar Budaya Masyarakat yang Mengapresiasi Cagar Budaya Yang Dilestarikan					Efisien
QAA003	Masyarakat yang Mengapresiasi Cagar Budaya	95,44	100	47,33	168,32	Sangat Efisien
RDN015	Cagar Budaya Yang Dilestarikan	96,6	100	24,67	111,68	Sangat Efisien
EBA962	Layanan Umum	90,45	100	9,55	73,88	Cukup Efisien
EBA994	Layanan Umum	97,97	114,29	2,03	55,08	Kurang Efisien
TOTAL		97,2	100	10,94	77,35	Cukup Efisien

Sumber: Data diolah 2024

Sesuai Tabel 4 informasi yang diperoleh adalah persentase nilai efisiensi realisasi anggaran UPT BPCB Jateng tahun 2022 secara keseluruhan Cukup Efisien dengan nilai 77,35%. Nilai efisiensi realisasi anggaran Sangat Efisien terjadi pada keluaran Masyarakat yang Mengapresiasi Cagar Budaya (QAA003) dan Cagar Budaya Yang Dilestarikan (RDN015). Nilai efisiensi realisasi anggaran Cukup Efisien terjadi pada keluaran Naskah Pelestarian Cagar Budaya (ABH006) dan Layanan Umum (EBA962). Nilai efisiensi realisasi anggaran Kurang Efisien terjadi pada keluaran Layanan Umum (EBA994).

Tabel 5. Perhitungan Efisiensi Anggaran BPK X tahun 2023

Kode Keluaran	Nama Keluaran	Realisasi Anggaran (%)	Capaian Keluaran (%)	Efisiensi (%)	Nilai Efisiensi (%)	Kategori
ABH001	Naskah Pelestarian Warisan Budaya	94,24	112,5	18,26	95,65	Sangat Efisien
QDD001	Fasilitasi dan Kemitraan Warisan Budaya	99,15	100	0,85	52,14	Kurang Efisien
EBA962	Layanan Umum	93,98	100	6,02	65,06	Cukup Efisien
PEG001	Giats Warisan Budaya	96,15	111,11	14,97	87,41	Efisien
QMA001	Data dan Informasi Warisan Budaya	96,07	100	3,93	59,81	Kurang Efisien
EBA994	Layanan Perkantoran	98,08	100	1,92	54,81	Kurang Efisien
EBB951	Layanan Sarana Internal	99,95	101,41	1,46	53,66	Kurang Efisien
RDN001	Cagar Budaya,	98,44	139,69	41,26	153,14	Sangat



ODCB dan OPK Yang Dilestarikan					Efisien
TOTAL	98,22	121,88	29,83	124,57	Sangat Efisien

Sumber: Data diolah 2024

Sesuai Tabel 5 informasi yang diperoleh adalah persentase nilai efisiensi realisasi anggaran UPT BPK X tahun 2023 secara keseluruhan Sangat Efisien dengan nilai 124,57%. Nilai efisiensi realisasi anggaran Sangat Efisien terjadi pada keluaran Naskah Pelestarian Warisan Budaya (ABH001) dan Cagar Budaya, ODCB dan OPK Yang Dilestarikan (RDN001). Nilai efisiensi realisasi anggaran Efisien terjadi pada keluaran Giat Warisan Budaya (PEG001). Nilai efisiensi realisasi anggaran Cukup Efisien terjadi pada keluaran Layanan Umum (EBA962). Nilai efisiensi realisasi anggaran Kurang Efisien terjadi pada keluaran Fasilitasi dan Kemitraan Warisan Budaya (QDD001), Data dan Informasi Warisan Budaya (QMA001), Layanan Perkantoran (EBA994) dan Layanan Sarana Internal (EBB951).

#### 4. Diskusi

Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa penggabungan satuan kerja berpengaruh positif terhadap tingkat efisiensi realisasi anggaran pada UPT Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X.

Tabel 6. Perbandingan Efisiensi Anggaran

Kode Keluaran	Nama Keluaran	NE (%) BPCB DIY 2022	NE (%) BPNB DIY 2022	NE (%) BPCB JATENG 2022	NE (%) BPK X 2023	Kategori BPK X 2023
PEG001	Giat Warisan Budaya		103,58		87,41	Efisien
QMA001	Data dan Informasi Warisan Budaya		81,35		59,81	Cukup Efisien
ABH001	Naskah Pelestarian Warisan Budaya		54,17	74,73	95,65	Sangat Efisien
RDN001	Cagar Budaya, ODCB dan OPK Yang Dilestarikan	125,74		111,68	153,14	Sangat Efisien
EBA994	Layanan Perkantoran	59,36	91,74	55,08	54,81	Cukup Efisien
EBA962	Layanan Umum	54,29	100,98	73,88	65,06	Cukup Efisien
TOTAL		73,21	89,56	77,35	124,57	Sangat Efisien

Sumber: Data diolah 2024

Sesuai Tabel 6 informasi yang diperoleh adalah persentase nilai efisiensi realisasi anggaran UPT BPK X tahun 2023 secara keseluruhan Sangat Efisien dengan nilai 124,57%. Nilai efisiensi realisasi anggaran menunjukkan pengaruh yang bervariasi pasca penggabungan yang terjadi pada beberapa keluaran. Nilai efisiensi realisasi anggaran menunjukkan tren positif pasca penggabungan terjadi pada keluaran Naskah Pelestarian Warisan Budaya (ABH001) dan Cagar Budaya, ODCB dan OPK Yang Dilestarikan (RDN001). Hal ini karena sebelum penggabungan nilai efisiensi pada keluaran Naskah Pelestarian Warisan Budaya (ABH001) UPT BPNB DIY sebesar 54,17% dan UPT BPCB Jateng sebesar 74,73% pasca penggabungan menjadi BPK X nilai efisiensi menjadi sebesar 102,29% dan pada keluaran Cagar Budaya, ODCB dan OPK Yang Dilestarikan (RDN001) nilai efisiensi yang sebelumnya UPT BPCB DIY sebesar 125,74% dan UPT BPCB Jateng sebesar 111,68% pasca penggabungan menjadi BPK X nilai efisiensi menjadi sebesar 153,14%

## **5. Simpulan**

Sesuai perhitungan menunjukkan bahwa tingkat efisiensi realisasi anggaran pada UPT Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta dan UPT Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah dalam kategori Cukup Efisien, sedangkan pada UPT Balai Pelestarian Nilai Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kategori Efisien. Tingkat efisiensi realisasi anggaran pada UPT Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X pada saat tahun pertama berjalan pasca penggabungan menunjukkan dalam kategori Sangat Efisien. Dengan demikian, menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan anggaran pasca penggabungan dilakukan secara optimal untuk capaian keluaran yang telah ditentukan bahkan melebihi dari yang telah ditentukan.

Penelitian hanya memfokuskan pada data variabel yaitu Rencana Kerja Anggaran, Laporan Kinerja, dan Laporan Realisasi Anggaran pada tahun 2022 – 2023 karena berfokus pada periode penggabungan satuan kerja tersebut, terhadap Tingkat Efisiensi pada UPT Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X dan hanya mampu menjelaskan pengaruh efisiensi anggaran pasca penggabungan. Disarankan Penelitian selanjutnya mampu memberikan informasi lebih luas seperti perubahan dalam alokasi anggaran, perbedaan dalam penggunaan anggaran, dan peran manajemen dan kebijakan dalam rencana anggaran yang belum ditemukan di dalam penelitian ini serta menambah periode penelitian baik data sebelum dan sesudah periode penggabungan satuan kerja.

## **6. Ucapan terima kasih**

Penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada Ibu Manggar Sari Ayuati selaku Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X dan seluruh pegawai yang telah berperan aktif dalam penelitian ini. Kerjasama, partisipasi, dan dedikasi mereka dalam kesuksesan penelitian ini.

Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Ibu Ratri Paramitalaksmi sebagai dosen pembimbing yang memberikan arahan dan bimbingan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian ini. Semua pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, berperan penting dalam keberhasilan penelitian ini. Terima kasih atas kerja sama dan partisipasi yang luar biasa dari semua pihak yang terlibat

## 7. Referensi

- Amelinda, A., Situmorang, M., & Octavianty, E. (2022). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Depok. *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 8(2), 271-284.
- Arfiani, M., Rudianto, T., Hikmah, N., Kadriyani, E., & Handayan, M. (2023). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)*, 1(2), 208-215.
- Fathurrahman, Andiana, B. D. L., Aprilani, T. L., & Zihatul, F. (2023). Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Mataram. *Jurnal Kompetitif: Media Informasi Ekonomi Pembangunan Manajemen dan Akuntansi*, 9(2), 1-17.
- Fitrah, A., & Handayati, P. 2022. Analisis Efisiensi Anggaran pada Instansi Pemerintahan Badan Layanan Umum (Budget Efficiency Analysis In Government Agencies Public Service Agency).
- Hidayat, T. N., Sembiring, E. E., & Nugraha, D. S. (2022). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Realisasi Anggaran Belanja pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut (Analysis of Effectiveness and Efficiency of Budget Realization in Department of Industry, Trade, Energy and Mineral Resources Garut Regency). *Indonesian Accounting Research Journal*, 3(1), 51-58.
- Ihsan, M., Abdullah, G., & Murniati, N. A. N. (2022). Implementasi Regrouping dalam Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Pendidikan. *Jurnal Prakarsa Paedagogia*, 5(1), 70-76.
- Jumaroh & Sugiharti, R. (2021). Efektifitas dan efisiensi realisasi anggaran belanja: studi kasus di BAPPEDA Kabupaten Temanggung. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 1(1), 55-68.
- Khaira, F., Umar, Z., Gadeng, T., & Yola, C. (2022). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Pangan Aceh Tahun 2018-2020. *Jurnal Akuntansi Muhammadiyah*, 12(2), 209-216.
- Kusumawati, O., Animah, & Isnawati (2022). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Dinas Sosial Kota Mataram. *JIAI (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia)*, 7(2), 125-141.
- Lisnasari, Guasmin, & Haryani, S. (2022). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Realisasi Anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu (Analysis of the Effectiveness and Efficiency of Budget Realization at the Office of Women's Empowerment and Child Protection in Palu City). *Jurnal Kolaboratif Sains*, 5(2), 89-95.
- Lona, S. S., Perseveranda, M. E., & Manafe, H. A. (2023). Analisis Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(1), 879-889.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2021. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK22/PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 2022. Permendikbudristek No.

- 33 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pelestarian Kebudayaan. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Milenia, A. F., Sibarani, J. L., & Hidayat, A. (2022). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Realisasi Anggaran sebagai Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara. *JAKP: Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perpajakan*, 5(2), 105-113.
- Muchran, M., Winarsih, E., & Heldawati (2021). Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan. *AJAR*, 4(2), 133-142.
- Nugraeni, Paramitalaksmi, R., & Wafa, Z. (2022). Rasio Efisiensi dan Rasio Keserasian untuk Menilai Kinerja Pemerintah Daerah. Naskah Publikasi Program Studi Akuntansi. Universitas Mercu Buana Yogyakarta
- Petra, B. A., & Sari, Y. P. (2021). Analisa Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal EKOBISTEK*, 10(1),84-88.
- Puspitaria, M., Abbas, M. A.Y. & Yanti N. (2023). Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021. *Jurnal Aset Mahakam*, 1(3), 139-150.
- Rahmawati, F., & Susanto, A. A. (2023). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja Daerah BPKAD Kabupaten Bojonegoro 2018-2022. *Ecodemica: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Bisnis*, 7(2), 202-208.
- Saleh, R., & Andriana, N. (2021). Efektivitas Dan Efisiensi Belanja Berdasarkan Anggaran Berbasis Kinerja Pada KPP Pratama Bulukumba. *Jurnal Info Artha*, 5(2), 130-139.
- Siallagan, Y. T., & Kusmilawaty, K. (2024). Efisiensi Realisasi Anggaran Belanja Dan Kinerja Keuangan Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pematang Siantar. *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah (JUPIEKES)*, 2(1), 165-176.
- Utami, B. S. A., Basya, M. M., & Anindhita, A.Y. (2021). Efisiensi Anggaran Belanja Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2018. *Jurnal Ekonomi-Manajemen-Akuntansi*, 17(2), 98-104
- Wahyuningsih, S., Azizah, S. N., & Wahyungningtyas, N. (2022). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Ditinjau Dari Efektivitas Dan Efisiensi Penggunaan Anggaran Pada Desa “X” Periode 2017 – 2018. *Jurnal E-Bis (Ekonomi-Bisnis)*, 6(1), 89-98.
- Widowati, S. A., & Fatimah, A. N. (2022). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah pada BPKAD Pemerintah Kota Magelang (Tahun 2015-2018). *ECODUCATION Economics & Education Journal*, 4(1), 71-82